



BAPPENAS
Kementerian Perekonomian dan Pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Co-funded by
the European Union



kerja sama
jerman
KOLABORASI SAMA MELAKUKAN

Financed by



Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



Ministry of Foreign Affairs



In partnership with

Canada



CIFOR



World
Agroforestry



SILVUPOR
INDONESIA

Taklimat

Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB)

Penguatan Tata Kelola Keberlanjutan Yurisdiksi melalui IYB:
Penyelarasan Kebijakan, Sistem, dan Kelembagaan untuk
Tata Kelola Komoditas Berkelanjutan



Taklimat

Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB)

**Penguatan Tata Kelola Keberlanjutan Yurisdiksi melalui IYB:
Penyelarasan Kebijakan, Sistem, dan Kelembagaan untuk
Tata Kelola Komoditas Berkelanjutan**

Jakarta, 19 Mei 2026

Daftar Isi

1. Daftar Istilah.....	6	10. Perhitungan Indikator.....	18
2. Pesan Kunci	7	11. Platform IYB.....	19
3. Latar Belakang.....	8	Rancangan Alur Proses.....	20
4. Historis Penyusunan	9	Apa yang Dapat Dilakukan Tiap Peran?.....	21
5. Relevansi IYB dengan RPJPN dan RPJMN.....	10	Tata Cara Registrasi dan Login	22
6. Kaidah Pengembangan IYB.....	11	Penilaian Kabupaten.....	23
7. Fitur dalam IYB.....	12	Profil Kabupaten.....	24
8. Target Manfaat IYB.....	13	Konsolidasi.....	25
9. Pendekatan 3 Pilar Pembangunan Berkelanjutan14		Indikator (Input Indikator atau <i>Bulk Upload</i>)	26
Dimensi Lingkungan.....	15	12. Pembelajaran dari Uji Coba.....	27
Dimensi Sosial Ekonomi.....	16	13. Penutup.....	28
Dimensi Tata Kelola	17		

1. Daftar Istilah

Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kemen PPN	: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
BPS	: Badan Pusat Statistik	KHG	: Kesatuan Hidrologis Gambut
DBH	: Dana Bagi Hasil	KLH	: Kementerian Lingkungan Hidup
GBF	: Global Biodiversity Framework	KMP	: Kemitraan Multi Pihak
GRK	: Gas Rumah Kaca	KPA	: Kawasan Pelestarian Alam
ILO	: The International Labour Organization	KSA	: Kawasan Suaka Alam
IPBES	: <i>The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services</i> (Platform Kebijakan-Ilmu Pengetahuan Antar Pemerintah tentang Keanekaragaman Hayati dan Jasa Ekosistem)	KSDAHE	: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
IYB	: Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan	NDC	: Nationally Determined Contributions
ISPO	: Indonesian Sustainable Palm Oil	RAD KSB	: Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan
Kemen ATR/BPN	: Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
		RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
		RTRWK	: Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten / Kota
		TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

2. Pesan Kunci

- Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan (*Sustainable Jurisdiction/Jurisdictional Approach*) dalam pengertian dimaksud merupakan pendekatan tata kelola yang mengedepankan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan, penggunaan lahan, serta sumber daya alam dalam suatu wilayah sesuai dengan kewenangannya. IYB untuk Sektor Perkebunan dibangun berdasarkan pendekatan yurisdiksi untuk tingkat daerah kabupaten.

- Potensial manfaat IYB **bagi petani**, yaitu:
 - 1 Pasar bisa langsung berhubungan dengan yurisdiksi sehingga petani tidak perlu sertifikasi secara individu
 - 2 Kondisi di yurisdiksi yang memudahkan petani untuk mendapatkan sertifikasi secara individu
 - 3 Petani dapat memperoleh harga yang lebih tinggi untuk komoditasnya di pasar (negara atau perusahaan) yang peduli tentang keberlanjutan lingkungan

- Potensial manfaat IYB bagi **pemerintah daerah**, yaitu:
 - 1 Membantu pemerintah daerah mencapai target pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang melalui tata kelola lahan dan sumber daya alam yang lebih baik
 - 2 Membantu pemda mencapai kinerja keberlanjutan yang baik, sehingga membuka peluang untuk mendapatkan dukungan insentif, pendanaan, investasi hijau, atau kemitraan dengan pasar dan lembaga pembangunan internasional.

3. Latar Belakang

- Masalah seperti kebakaran hutan, polusi air, dan konflik lahan tidak mengenal batas kebun. **Pendekatan yurisdiksi memungkinkan solusi yang lebih holistik karena mencakup seluruh wilayah di bawah satu payung regulasi lokal.**
- Sertifikasi keberlanjutan yang konvensional sering sulit dijalankan dan mahal bagi petani kecil. Dengan pendekatan yurisdiksi, Pemerintah Daerah dapat memberikan **dukungan kolektif, sehingga semua petani di wilayah tersebut (bukan hanya yang besar) dapat menerapkan praktik yang lebih baik** dan tetap terhubung dengan pasar global.
- Pasar internasional semakin menuntut komoditas bebas dari permasalahan lingkungan dan etis, seperti misalnya deforestasi. **Yurisdiksi yang terbukti berkelanjutan menjadi tujuan yang menarik bagi pembeli dan investor internasional (Green Investment).**



Indonesia, dengan kompleksitas tata kelola sumber daya alam, membutuhkan sistem indikator yang dapat mengukur capaian keberlanjutan di tingkat yurisdiksi. Indikator ini dapat membantu berbagai pihak untuk:

- Menilai performa pemerintah daerah,
- Memastikan keterpaduan antara kebijakan nasional dan daerah, serta mendukung sistem pelaporan yang transparan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
- Membangun rencana penguatan tata kelola yang efektif untuk memperkuat indikator berkelanjutan yang masih lemah

4. Historis Penyusunan

Waktu	Highlight Perubahan Utama
Maret 2021	Versi awal dirilis
Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> ● Penambahan Indikator Ketahanan Pangan ● Penambahan detail kebutuhan data berbasis pembaruan manual untuk seluruh indikator (1-22)
Sep-22	<ul style="list-style-type: none"> ● Perubahan nama “Terpercaya” menjadi “Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB)” ● Update dan review indikator
Oktober 2024	<ul style="list-style-type: none"> ● Update jumlah indikator, penambahan subbab tujuan, manfaat, dan kemitraan multipihak ● Penambahan dasar kebijakan, dimensi-prinsip-kriteria, matriks, dan <i>sustainability report</i> ● Penyesuaian diksi dan metode, penambahan indikator baru, pergeseran indikator, dan tambahan indikator lanjutan ● Indikator dikelompokkan ke Lingkungan, Sosial-Ekonomi, dan Tata Kelola ● Opsi metode menggunakan indeks komposit
Apr-25	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembaruan RPJMN dan RPJPN, fokus ruang lingkup perkebunan ● Jumlah indikator menjadi 19 indikator utama dan 9 indikator lanjutan, pembaruan matriks indikator dan sumber data ● Penyesuaian definisi dan formula, penambahan sumber data, revisi narasi, pengembalian & perubahan indikator, serta penambahan indikator baru (gender, perhutanan sosial, akses informasi, mekanisme pengaduan)

5. Relevansi IYB dengan RPJPN dan RPJMN

Dalam RPJPN 2025-2045

Tata kelola yurisdiksi berkelanjutan merupakan bagian dalam kebijakan jangka panjang untuk **peningkatan produktivitas sektor pertanian**.

- **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029** tentang pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan membahas mengenai **pendekatan yurisdiksi**.
- Latar belakang pendekatan yurisdiksi: **REDD+**, **komitmen rantai pasokan komoditas bebas deforestasi**, terkait dengan hak-hak **masyarakat adat** (Seymour et al 2020).
- Pertanian, termasuk alih fungsi lahan gambut dan hutan, **berkontribusi terhadap emisi GRK sebesar 23%**, 73% dari deforestasi hutan tropis (40% didorong oleh pertanian komersil) (FAO, 2021)
- Kontribusi PDRB sektor pertanian: **1,53% (BPS, 2023)**, dengan total nilai ekspor sektor pertanian: **4,34 miliar USD**.

Tantangan utama: memisahkan degradasi lingkungan dari pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan (*decoupling*) yang terkait dengan perdagangan internasional.

6. Kaidah Pengembangan IYB

- Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB) menggunakan **pendekatan nasional** sehingga pengukuran capaian daerah menggunakan data-data yang dikelola secara nasional. Namun, penggunaan data-data tingkat daerah tetap menjadi pertimbangan dalam pengukuran capaian IYB.
- IYB memiliki dua indikator yaitu **indikator utama dan indikator lanjutan** yang merujuk pada sifat data yaitu data nasional dan data daerah.
- Penggunaan data-data daerah pada indikator lanjutan menjadi pertimbangan untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan pemerintah daerah.
- IYB bersifat progresif dan bertumbuh yang artinya **secara bertahap standar kualitas indikator akan direvisi dan ditingkatkan mengikuti perkembangan kinerja pemerintah daerah.**
- Indikator IYB yang disusun dan ditetapkan untuk pengukuran telah memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Reasonable and Time Bound*) sehingga diharapkan dapat mempermudah pemerintah daerah dalam mengukur, menyusun dan melaporkan capaian IYB daerahnya.
- IYB memiliki tiga (3) Dimensi Keberlanjutan yaitu Dimensi Lingkungan, Dimensi Sosial Ekonomi, dan Dimensi Tata Kelola. Masing-masing Dimensi Keberlanjutan memiliki Prinsip, Kriteria dan Indikator yang akan memandu pemerintah daerah dalam memenuhi target-target pada IYB

7. Fitur dalam IYB

- IYB dikembangkan pada tahap awal untuk komoditas perkebunan. Pada tahap ini, panduan IYB dikembangkan dengan **fokus utama pada sektor perkebunan**, namun tetap terbuka untuk diperbarui dan diperluas penerapannya ke sektor-sektor lain.
- Sejalan dengan agenda pemerintah, IYB diharapkan dapat memberikan panduan untuk perencanaan dan evaluasi kinerja suatu daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip **berkelanjutan pada rantai pasok komoditas perkebunan** di wilayahnya.
- IYB untuk Sektor Perkebunan dibangun berdasarkan **pendekatan yurisdiksi untuk tingkat daerah kabupaten**. Hal ini sejalan dengan pembagian urusan pertanian kepada pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian, sejalan dengan konsep pendekatan yurisdiksi berkelanjutan, IYB mensyaratkan juga sinergi antara otoritas pemerintah dengan kemampuan atau sumber daya yang dimiliki berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.
- IYB dibangun melalui **proses kolaboratif yang melibatkan proses diskusi multi-pihak**, sehingga selain diskusi dengan unsur pemerintah, proses pengembangan IYB juga melibatkan masyarakat sipil dan komunitas bisnis.
- Seluruh indikator ini yang dibangun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan Indonesia serta diselaraskan dengan komitmen internasional seperti **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Perjanjian Paris (*Paris Agreement*)**.
- IYB ini bersifat dinamis karena dibangun **menyesuaikan kapasitas dan kapabilitas pemerintah** termasuk berdasarkan ketersediaan data utamanya di tingkat nasional. Secara bertahap, indikator-indikator akan terus diperbarui untuk menjadi lebih baik terutama dalam mendukung pencapaian TPB.

8. Target Manfaat IYB

Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah

- Sistem pemantauan IYB menjadi alat bantu pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti dan mengembangkan system insentif dan disinsentif bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan Perkebunan berkelanjutan.
- Mendorong kontribusi PDRB sektor pembangunan hijau di daerah.
- Menyediakan portfolio Investasi hijau di daerah.
- Mendorong skema insentif non-fiskal terkait pembangunan berkelanjutan di daerah.

Bagi Petani

- Pasar bisa langsung berhubungan dengan yurisdiksi sehingga sertifikasi secara individu bukan satu-satunya cara agar petani terhubung ke pasar global
- Bisa tercipta kondisi di yurisdiksi yang memudahkan petani untuk mendapatkan sertifikasi secara individu
- Petani dapat memperoleh harga yang lebih tinggi untuk komoditasnya di pasar (negara atau perusahaan) yang peduli tentang keberlanjutan lingkungan

Bagi Sektor Swasta/Pasar

- Meningkatkan kepastian investasi pada sektor perkebunan di daerah
- Menampilkan informasi profil kelayakan daerah dalam pengembangan investasi perkebunan berkelanjutan



9. Pendekatan 3 Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Pendekatan tiga pilar dimaksudkan untuk:

- Menjaga keseimbangan pembangunan, tidak hanya aspek ekonomi saja melainkan mempertimbangkan dampak pada lingkungan dan keadilan sosial, sehingga hasilnya lebih adil dan berkelanjutan.
- Mengurangi risiko jangka panjang, potensi degradasi lingkungan dan konflik sosial bisa meningkat, dengan memasukkan pilar sosial dan lingkungan, IYB membantu mengantisipasi risiko sosial-ekologis sejak dini.
- Membangun tata kelola yang inklusif, mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan implementasi, sehingga indikator lebih dapat diterima semua pihak dan meningkatkan akuntabilitas.
- Mendukung komitmen nasional & global, keselarasan dengan SDGs, Paris Agreement, dan agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia, sehingga indikator IYB dapat dipakai sebagai alat ukur capaian Indonesia dalam forum internasional.
- Meningkatkan legitimasi dan kredibilitas, memberi jaminan kepada investor, pasar internasional, dan mitra pembangunan bahwa yurisdiksi menjalankan prinsip sustainability yang komprehensif, bukan parsial.



Keseimbangan Pembangunan

Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan



Pengurangan Risiko

Mengurangi risiko jangka panjang untuk memastikan stabilitas dan keamanan



Tata Kelola Inklusif

Membangun sistem tata kelola yang melibatkan semua pemangku kepentingan



Komitmen Nasional & Global

Mendukung dan memenuhi komitmen nasional dan global



Legitimasi & Kredibilitas

Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan dalam proses pembangunan

Dimensi Lingkungan

Prinsip: Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam di daerah dilakukan secara lestari, memperhatikan aspek daya dukung dan tampung lingkungan hidup untuk dalam rangka mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Kriteria	No	Indikator	Y/P
1. Pembangunan sektor perkebunan daerah dilandasi dengan komitmen bersama untuk melindungi lingkungan , termasuk hutan, dan lahan gambut.	Indikator 1	Perlindungan hutan tetap	Y
	Indikator 2	Perlindungan area penting untuk layanan ekologi	Y
2. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan perlu memperhatikan perlindungan areal preservasi , mengendalikan kualitas lingkungan hidup dan memiliki strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan berkontribusi pada NDC (<i>Nationally Determined Contributions</i>).	Indikator 3	Pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Y
	Indikator 4	Perlindungan lahan gambut	Y
	Indikator 5	Pengendalian kualitas lingkungan hidup	Y
	Indikator 6	Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Y

Y: menilai keberlanjutan pada tingkat Yurisdiksi suatu daerah P: menilai keberlanjutan pada sektor Perkebunan dalam suatu daerah

Dimensi Sosial Ekonomi

Prinsip: Pembangunan daerah berkelanjutan **mengakselerasi kekuatan dan ketangguhan sosial ekonomi daerah**, termasuk mendorong pemberdayaan perempuan, menghargai hak-hak masyarakat lokal/adat dan mendukung partisipasi pekebun dalam rangka memastikan inklusivitas (*no one left behind*), bebas kelaparan, dan penghapusan kemiskinan.

Kriteria	No	Indikator	Y/P
1. Pembangunan daerah berkelanjutan menjadi pengungkit dan penggerak perekonomian daerah melalui kontribusi terhadap PDRB sektor dan peningkatan serapan tenaga kerja, peningkatan produktivitas dan jaringan pasar sehingga daerah bebas kelaparan dan menurunkan tingkat kemiskinan serta sejalan dengan upaya meningkatkan ketahanan pangan.	Indikator 7	Pengusahaan lahan oleh pekebun rakyat	P
	Indikator 8	Pendaftaran pekebun rakyat	P
	Indikator 9	Pekebun yang tergabung dalam kelompok pekebun	P
	Indikator 10	Kecukupan penyuluh	Y
	Indikator 11	Produktivitas perkebunan rakyat	P
	Indikator 12	Indeks ketahanan pangan	Y
2. Sinergitas pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat, dengan mengedepankan perlindungan atas hak-hak masyarakat hukum adat.	Indikator 13	Nilai tambah pertanian terhadap PDRB	Y
	Indikator A	Pengakuan masyarakat hukum adat	Y
3. Berkembang dan menguatnya kelompok masyarakat (asosiasi pekebun) serta memberdayakan perempuan sehingga terwujud ekonomi kolektif yang dapat membangun ketangguhan ekonomi dan peningkatan modal sosial.	Indikator B	Kemitraan pekebun	P
	Indikator C	KUPS yang mengembangkan komoditas perkebunan berkelanjutan	P

Y: menilai keberlanjutan pada tingkat Yurisdiksi suatu daerah

P: menilai keberlanjutan pada sektor Perkebunan dalam suatu daerah

Dimensi Tata Kelola

Prinsip: Pembangunan daerah berkelanjutan memenuhi **praktik tata kelola yang baik** sehingga target-target keberlanjutan daerah direncanakan, dilaksanakan, dan dipantau secara obyektif, terbuka, dan partisipatif.

Kriteria	No	Indikator	Y/P
1. Komitmen lingkungan, ekonomi dan sosial menjadi bagian kebijakan pembangunan kabupaten yang didukung dengan pilar demokrasi lingkungan (akses informasi, partisipasi, dan keadilan).	Indikator 14	Perencanaan pengelolaan lingkungan hidup	Y
	Indikator 15	Alokasi anggaran daerah untuk keberlanjutan	Y
2. Prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi bagian integral dari dokumen perencanaan daerah yang dibangun atas dasar pemahaman keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta melalui proses pelibatan pemangku kepentingan dan masyarakat yang hakiki.	Indikator 16	Akses informasi publik	Y
	Indikator 17	Mekanisme pengaduan pelayanan publik	Y
	Indikator D	Perkebunan bersertifikat berkelanjutan	P
	Indikator E	Penandaan anggaran perkebunan yang responsif gender	Y
3. Pemerintah kabupaten membentuk dan memimpin sebuah kelompok kerja multipihak yang beranggotakan perwakilan perusahaan, pekebun, masyarakat adat dan lembaga swadaya masyarakat, yang kemudian bersama-sama mengidentifikasi dan menyepakati risiko-risiko, solusi serta target-target keberlanjutan di tingkat yurisdiksi, seperti penurunan deforestasi, pemberdayaan pekebun, pembangunan dukungan peraturan dan regulasi.	Indikator F	Partisipasi publik dalam perencanaan daerah	Y
	Indikator G	Keberadaan kelembagaan multi pihak (KMP)	Y
	Indikator H	Padiatapa yang terintegrasi dalam proses pengajuan perizinan perkebunan	P
4. Pemerintah daerah menggunakan sebuah sistem pemantauan keberlanjutan yang transparan sebagai bentuk akuntabilitas, yang membantu publik untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja keberlanjutan, termasuk skema sertifikasi.	Indikator I	Resolusi konflik lahan perkebunan	P
	Indikator J	Pelaksanaan penilaian usaha Perkebunan (PUP)	P

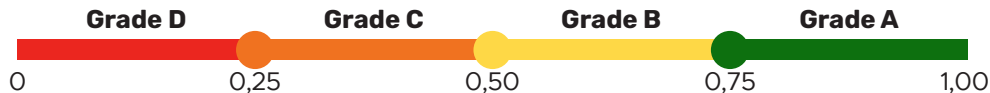
Y: menilai keberlanjutan pada tingkat Yurisdiksi suatu daerah **P:** menilai keberlanjutan pada sektor Perkebunan dalam suatu daerah

10. Perhitungan Indikator

Perhitungan Indikator Utama dilakukan pada 6 indikator lingkungan, 7 indikator sosial-ekonomi, dan 4 indikator tata kelola, dengan nilai maksimal 1.

Formula: Indeks Komposit = (Lingkungan × 30%) + (Sosial Ekonomi × 40%) + (Tata Kelola × 30%)

Metode Penilaian: Indeks Komposit



Skala nilai indeks komposit IYB

1. Nilai 0,75-1,00 adalah Grade A [Hijaul = artinya sangat baik.
2. Nilai 0,50-0,74 adalah Grade B [Kuning] = artinya baik
3. Nilai 0,25-0,49 adalah Grade C [Oranyel = artinya cukup
4. Nilai 0,00-0,24 adalah Grade D [Merah] = artinya perlu perhatian khusus

Perhitungan Indikator (Lanjutan)

Indikator lanjutan dinilai menggunakan tiga (3) bintang. Jika daerah memperoleh nilai maksimal pada semua indikator, maka nilai maksimal adalah 3 bintang.

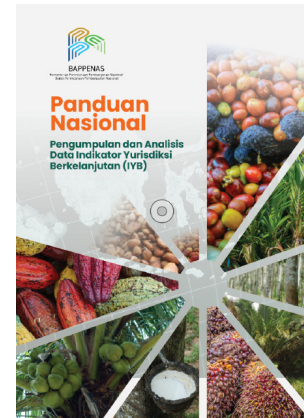


11. Platform IYB

Platform Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB) saat ini sedang dalam proses pemutakhiran dan migrasi ke Bappenas, didasari oleh Panduan Nasional Pengumpulan Data dan Analisis Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan.



Pindai QR untuk mengakses Platform IYB serta informasi lebih lanjut



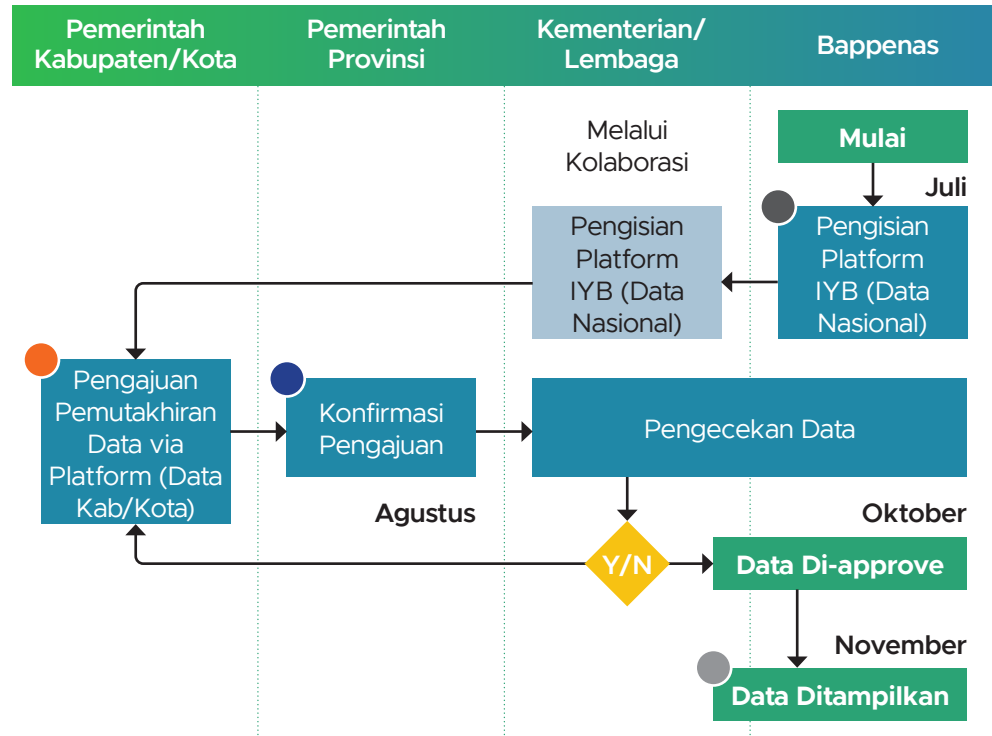
Fitur dalam Platform IYB:

- Peringkat distrik dan Informasi pencapaian keberlanjutan menurut kabupaten
- Informasi keberlanjutan kabupaten
- Penilaian dan analisis komprehensif dari setiap kabupaten

Rancangan Alur Proses

Platform IYB menjadi sarana konsolidasi data, dimana data nasional yang dikolaborasikan antara Bappenas dan kementerian/lembaga relevan yang menjadi wali data akan dilengkapi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Platform IYB.

Apabila terdapat data yang belum lengkap atau belum mutakhir, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengajukan pemutakhiran data dan menunggu approval dari Bappenas.



Keterangan: ● Penyelenggara ● Verifikator ● Kontributor teknis ● Viewer (masyarakat, asosiasi, pekebun)

Apa yang Dapat Dilakukan Tiap Peran?

Sebagai Bappenas

Mengakses Platform IYB untuk:

- Melihat Beranda
- Melihat Penilaian Kabupaten
- Melihat Profil Kabupaten
- Mengedit Data Indikator
- Mengedit Konsolidasi Data
- Mengedit Manajemen Peran



Sebagai Kementerian/ Lembaga atau Pemprov

Mengakses Platform IYB untuk:

- Melihat Beranda
- Melihat Penilaian Kabupaten
- Melihat Profil Kabupaten
- Mengedit Data Indikator (approval data daerah)



Sebagai Pemkab/Kota

Mengakses Platform IYB untuk:

- Melihat Beranda
- Melihat Penilaian Kabupaten
- Melihat Profil Kabupaten
- Mengedit Data Indikator (pengajuan data daerah)



Sebagai Viewer

Mengakses Platform IYB untuk:

- Melihat Beranda
- Melihat Penilaian Kabupaten
- Melihat Profil Kabupaten



Tata Cara Registrasi dan Login

- Klik Daftar



ID

Daftar

Login

- Isi baris Daftar dengan informasi sesuai dengan peran yang akan diambil:



**Peran 1: Admin
(Bappenas)**



**Peran 2: Admin
(Pemkab/Pemkot/Pemprov)**



**Peran 3: Wali Data
(Kementerian/ Lembaga)**



**Peran 4: Viewer
(Masyarakat, NGO)**

- Aktivasi akun agar dapat mengakses Dashboard Platform IYB

Daftar

Isi data berikut untuk membuat akun

Nama Lengkap

Email

Informasi Institusi

Data organisasi untuk keperluan verifikasi

Afiliasi

Nama Organisasi

Keamanan Akun

Buat password yang kuat untuk melindungi akun Anda

Password

 Lihat

Konfirmasi Password

Buat Akun

Sudah punya akun?

✓ **Registrasi Berhasil. User anda harus diaktifkan terlebih dahulu sebelum dapat digunakan** ✕

DATA INDIKATOR

Lihat Kinerja Kabupaten

Akses modul analisis data terintegrasi untuk evaluasi performa kabupaten berdasarkan standar IYB.

Penilaian (Grade) Kabupaten

Pantau indikator utama, tren data, dan perkembangan kabupaten dalam satu tampilan yang lebih rapi dan mudah dibaca.

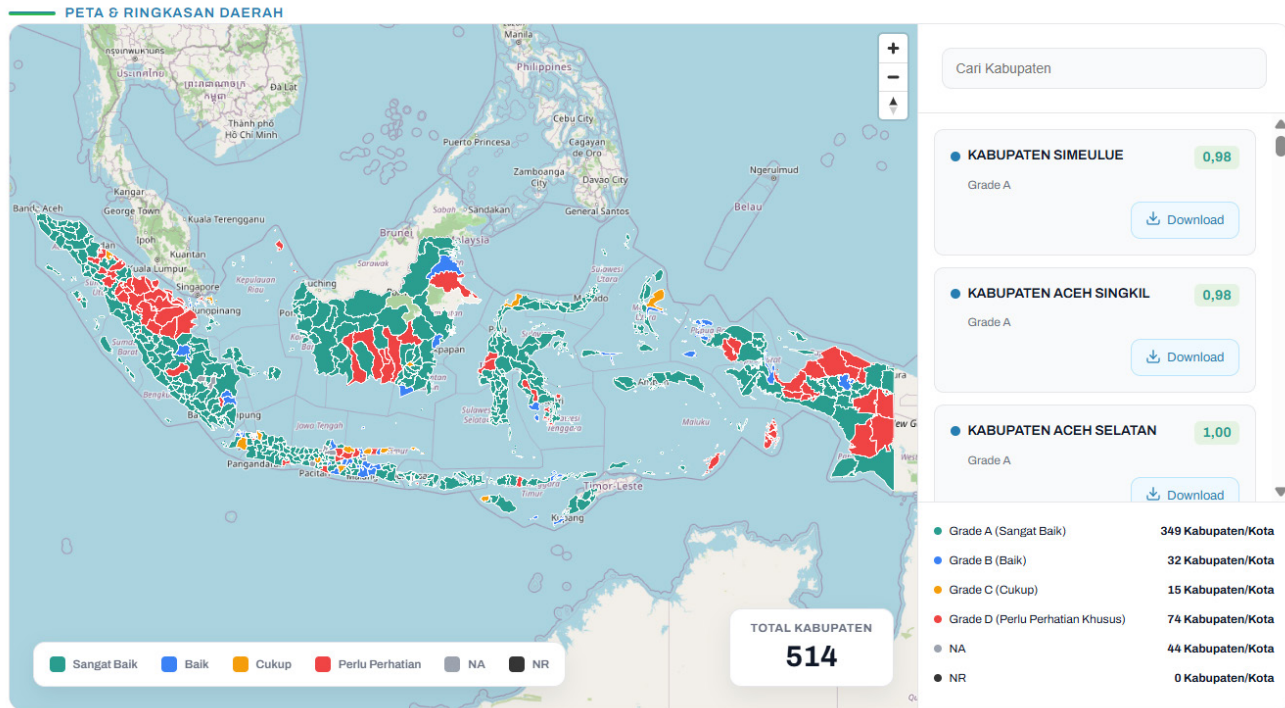
Akses Modul

Profil Kabupaten

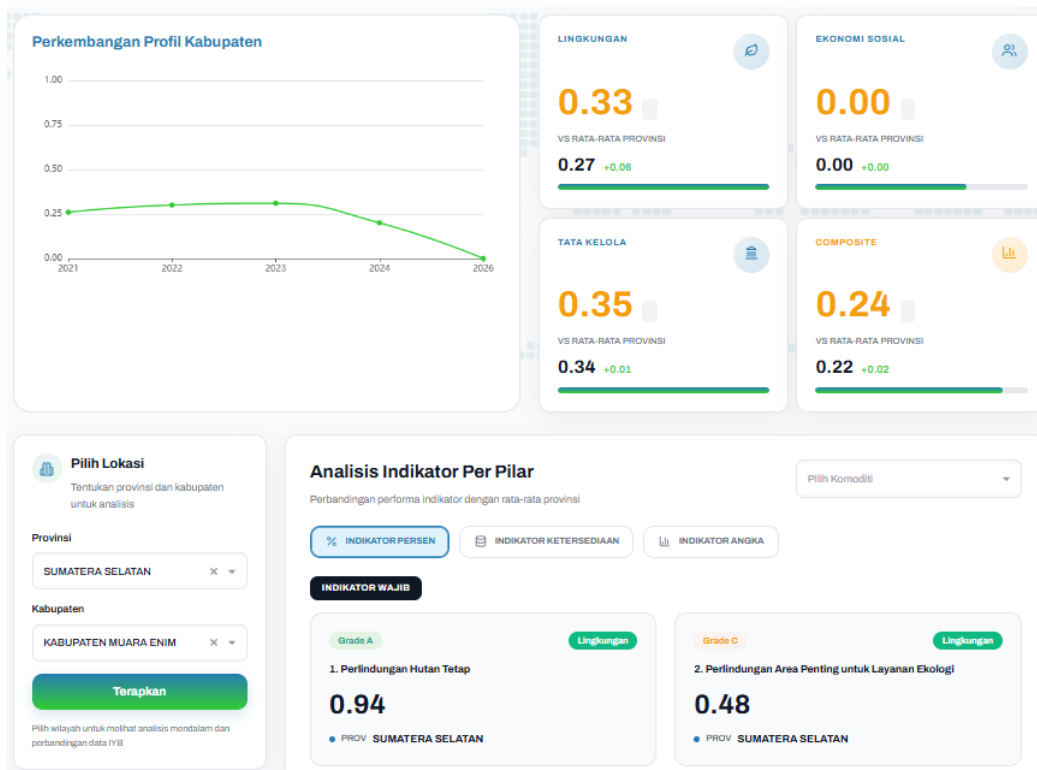
Lihat informasi profil, identitas wilayah, dan gambaran umum data kabupaten secara lebih terstruktur.

Akses Modul

Penilaian Kabupaten



Profil Kabupaten



Konsolidasi

1. Perlindungan Hutan Tetap

[← Kembali](#)

Tahun

2024



Provinsi

Pilih provinsi



Kabupaten

Pilih kabupaten



Status Approval

Pilih status approval



Reset

Filter

[+ Tambah](#)

No	Tahun	Provinsi	Kabupaten	Indikator	Nilai	Status	Last Update	
1	2024	ACEH	KABUPATEN SIMEULUE	1. Perlindungan Hutan Tetap	98.41	Pending	12/04/2026 11:29:18	
2	2024	ACEH	KABUPATEN ACEH SINGKIL	1. Perlindungan Hutan Tetap	97.87	Pending	12/04/2026 11:29:18	

Indikator (Input Indikator atau Bulk Upload)

IYB PLATFORM

BULK INSERT / INPUT DATA INDIKATOR SEKALIGUS

CATATAN:

- data yang diinput melalui page ini statusnya otomatis menjadi approved/terverifikasi
- apabila data dengan kabupaten dan tahun yang sama sudah pernah terinput, maka harus dilakukan konsolidasi
- mohon pastikan data yang diinput sudah benar, data yang salah tidak dapat diperbaiki secara bulk / massal (harus diperbaiki / dihapus satu per satu)
- mohon hubungi [pihak yang memiliki akses terhadap database] jika ingin melakukan penghapusan data secara massal

Tahun *

2026

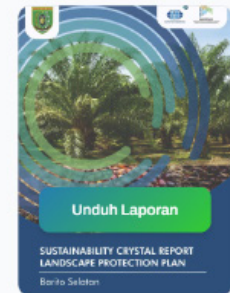
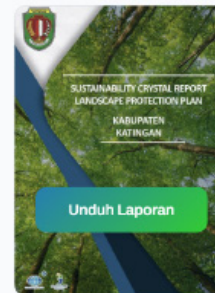
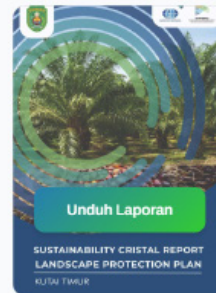
Upload Data Seluruh Indikator Sesuai Template

↑

Indikator 1: Perlindungan Hutan Tetap			
ID KABUPATEN	NAMA KABUPATEN	THPI RTRWLI	THP
1109	KABUPATEN SIMEULUE		
1110	KABUPATEN ACEH SINGKIL		
1101	KABUPATEN ACEH SELATAN		
1102	KABUPATEN ACEH TENGGARA		
1103	KABUPATEN ACEH TIMUR		
1104	KABUPATEN ACEH TENGAH		
1105	KABUPATEN ACEH BARAT		
1106	KABUPATEN ACEH BESAR		
1107	KABUPATEN PIDIE		
1111	KABUPATEN BIREUEN		
1108	KABUPATEN ACEH UTARA		
1112	KABUPATEN ACEH BARAT DAYA		

12. Pembelajaran dari Uji Coba

- Proses revisi diujicobakan di empat kabupaten pilot di Indonesia: Kutai Timur, Sigi, Bone, dan Muara Enim.
- Diskusi dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan utama. Pemerintah daerah memberikan masukan langsung terhadap indikator yurisdiksi berkelanjutan untuk memastikan relevansi dan kontekstualisasi lokal.
- Hasil penilaian dari proses diskusi digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keberlanjutan yurisdiksi. Pemangku kepentingan memberikan masukan aksi prioritas yang perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan performa pada indikator yang dinilai.



13. Penutup

- Diperlukan upaya bersama untuk menghimpun, menyelaraskan, dan memperbarui data dari berbagai sektor, termasuk pemerintah daerah, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Ketersediaan data yang komprehensif dan terbuka akan menjadi fondasi penting bagi pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan komoditas strategis.
- Bagi daerah dengan beberapa komoditas strategis, makna dari masing-masing indikator dapat berbeda sesuai karakteristik lokal. Karena itu, dibutuhkan penguatan kapasitas bagi semua pihak agar mampu menghimpun data dan informasi dari berbagai sektor serta membangun ruang dialog kolaboratif untuk memastikan sinergi tata kelola.
- Hasil penilaian IYB hendaknya dapat menjadi dasar untuk menyusun langkah-langkah perbaikan yang nyata mulai dari perencanaan, kebijakan, hingga implementasi di lapangan. Proses ini perlu diiringi dengan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan agar dampak positif terhadap tata kelola dan keberlanjutan komoditas di daerah dapat terwujud.

Untuk perhitungan indikator IYB
serta informasi lebih lanjut, kunjungi





Foto-foto oleh CIFOR-ICRAF Indonesia

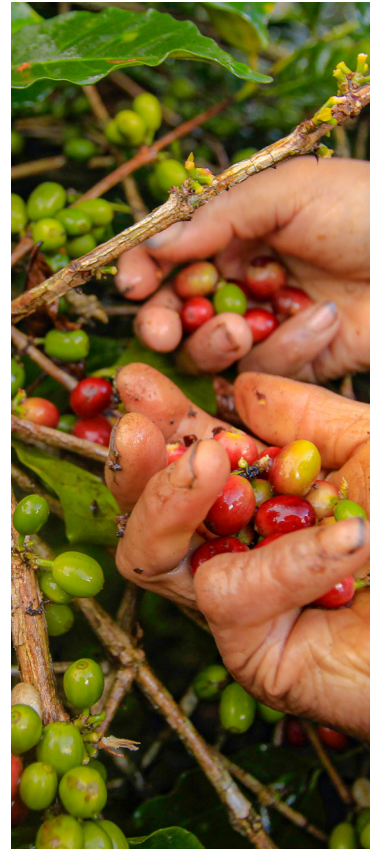


Foto-foto oleh CIFOR-ICRAF Indonesia

